BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Keuangan

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kompleksnya masalah perusahaan yang membuat semakin majunya teknologi yang semakin berkembang serta bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan, membuat perusahaan banyak menggunakan ilmu akuntansi dalam menjalankan usahanya untuk memperlancar kegiatan usaha mereka. Ekonom dan pakar akuntansi mendefinisikan akuntansi dengan pandangan yang berbeda. Definisi akuntansi sangat beragam dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, berikut beberapa definisi akuntansi menurut para ahli:

1. Menurut *American Institute of Certified Public Accountans* (AICPA) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang berfungsi untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat badan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam memilih alternatif dari suatu keadaan atau yang dapat disimpulkan: Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan menyajikan transaksi keuangan organisasi secara sistematis, serta menginterpretasikan hasilnya (Mene *et al*., 2018).
2. Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang di gunakan pihak pihak tertentu (Sujarweni, 2022).

3. Menurut Lilianti *et al*. (2018), akuntansi merupakan bidang keilmuan yang memiliki peran penting dalam berbagai hal. Ilmu akuntansi dapat membantu sebuah perusahaan, organisasi, investor, sehingga lembaga pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, seorang akuntan akan melakukan pencatatan, peringkasan, serta analisa dari data keuangan yang telah di kumpulkan.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai berbagai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan, sehingga hasilnya dapat dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha.

2.1.2 Peran Akuntansi Dalam UMKM

Dalam mengelola bisnis UMKM satu hal yang vital namun juga sering dianggap remeh oleh beberapa orang adalah ilmu akuntansi. Tidak sedikit yang berpikir bahwa menjalankan usaha dalam skala kecil tidak perlu mengatur keuangan karena semua pasti bisa di kontrol. Kenyataannya, walaupun usaha masih dalam skala kecil, manajemen keuangan merupakan hal terpenting yang harus dipertimbangkan. Berikut pentingnya akuntansi dalam UMKM yang dikelola menurut (Sujarweni, 2022):

1. Mengetahui Kondisi Bisnis.
2. Membantu Proses Peminjaman.
3. Mengontrol Keuangan Bisnis.

4. Menentukan Target Selanjutnya.

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Salah satu peran penting dalam organisasi ini adalah mendukung penegakan transparansi dan akuntabilitas entitas pelaporan keuangan di Indonesia. Untuk memenuhi peran dan fungsinya, IAI telah mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan kebutuhan berbagai entitas di Indonesia, baik bisnis maupun nirlaba, publik maupun swasta..

IAI memahami bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Agar terwujudnya usaha kecil dan menengah Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diperkenalkan pada 8 Desember dan mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM diharapkan dapat mendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke industri keuangan dan perbankan yang merupakan masalah klasik di Indonesia. Kami berharap SAK EMKM ini menjadi dasar untuk menyusun dan mengembangkan pedoman atau pedoman akuntansi bagi UMKM yang bergerak di bidang usaha.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk membantu pelaku UMKM untuk menyusun

laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang lebih baik lagi dan lebih sederhana untuk memudahkan usaha yang dijalankan, sehingga pengusaha-pengusaha tersebut bisa mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari usahanya serta dapat mengukur kinerja dalam menjalankan usahanya. Menurut Pardita *et al*. (2019), SAK EMKM memiliki tujuan untuk standarisasi laporan keuangan UMKM. Laporan keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna data untuk pengambilan keputusan ekonomi agar memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor.

Komponen laporan keuangan yang harus diungkapkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) yaitu:

1. Laporan Laba Rugi adalah bagian laporan keuangan perusahaan yang disusun selama suatu periode akuntansi yang menggambarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan yang diperlukan untuk menghasilkan laba bersih pada periode tersebut
2. Laporan pengelolaan keuangan menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Neraca suatu perusahaan dapat mencakup akun-akun berikut: Kas dan setara kas, piutang, inventaris, aset tetap, hutang, pinjaman bank, dan ekuitas. Meskipun SAK-EMKM tidak menentukan format atau urutan penyajian akun-akun, perusahaan dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan akun likuiditas dan liabilitas berdasarkan urutan jatuh temponya.
3. Catatan Catatan atas Laporan Keuangan yaitu catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan yang memuat penjelasan yang

tidak diungkapkan pada bagian awal laporan keuangan. Menurut SAK-EMKM, catatan dalam laporan keuangan UMKM harus memuat:

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-EMKM
b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.1.4 Laporan Keuangan

Menurut Rachmanti *et al*. (2019), Laporan keuangan adalah sarana utama entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, lembaga pemerintah, dan manajemen. laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Tujuan Laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Janrosl, 2018). Pelaporan keuangan mengumpulkan data transaksional dalam format yang berguna untuk pengambilan keputusan. Unsur-unsur pelaporan keuangan menurut SAK EMKM:

1. Laporan Posisi Keuangan yang berisi informasi terkait asset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Ruang lingkup laporan posisi keuangan yaitu, Kas dan setara kas, piutang, persediaan, asset tetap, utang usaha, utang bank
2. Laporan Laba Rugi yang berisi informasi terkait penghasilan dan beban selama periode pelaporan
3. Catatan atas laporan keuangan yang memuat:
   a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK EMKM
   b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
   c. Informasi tambahan atau rincian pos tertentu yang bermanfaat bagi pengguna. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiappos dala laporan keuangan merujuk ke informasi dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Utomo (2019), laporan keuangan sangat berguna bagi keberlangsungan UMKM. Manfaat pelaporan keuangan bagi UMKM antara lain:

a. Pelaporan keuangan memungkinkan pemilik UMKM mengantisipasi penipuan dan kesalahan dalam transaksi dan pencatatan.
b. Para pengelola UMKM bisa memperkirakan UMKM yang ada akan mengalami penurunan pendapatan bahkan bangkrut. Pemilik UMKM dapat menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur atau untuk tambahan modal dari investor.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Sujarweni (2022), Usaha mikro adalah suatu usaha produktif milik perseorangan yang berbentuk CV, Firma atau perseroan terbatas, dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berada) dan omset tahunan sebesar Tingginya mencapai hingga Rp 300.000.000. Usaha kecil adalah suatu usaha mandiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan, tetapi dijalankan oleh orang perseorangan atau perusahaan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh, atau bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan besar yang mempunyai media dan internet. Suatu jenis usaha ekonomi produktif. Nilainya melebihi Rp 50.000.000 sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perseroan berada, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000. Sedangkan usaha menengah adalah usaha kecil dengan total aset bersih lebih dari 20 juta yen atau dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung sebagai bagian dari perusahaan besar oleh perorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang. Suatu perusahaan, yaitu suatu usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri dan produktif. Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan untuk konstruksi komersial dengan pendapatan tahunan melebihi Rp 2,5 miliar). Maksimal Rp 50.000.000 (Ustman *et al*., 2019).

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Usaha adalah usaha yang secara

langsung atau tidak langsung memiliki, dimiliki, atau dikuasai oleh suatu usaha menengah atau suatu usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah atau merupakan bagian darinya. Menurut Rachmanti *et al*. (2019), usaha mikro merupakan kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia, UMKM sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada.

2.1.5.1 Kasifikasi UMKM

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan menjadi (Sujarweni, 2022) :

1. Usaha dagang; usaha dagang yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (*supplier*) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan contohnya:
   a. Keagenan: Agen koran/majalah, sepatu, pakaian, kosmetik.
   b. Pengecer: Minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan
   c. Sektor informal: Pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima
2. Usaha pertanian dan perikanan; suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman dan hewan untuk keuntungan contohnya:
   a. Perkebunan: Pembibitan, Sayur-sayuran
   b. Peternakan: Ternak ayam petelur, susu
   c. Perikanan: Tambak udang, kolam susu
3. Usaha Industri; suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan Baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen contohnya:

a. Industri makanan/minuman
b. Pertambangan
c. Pengrajin
d. Konveksi

4. Usaha Jasa; usaha yang melakukan kegiatan dengan memberikan jasa kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan contohnya:
   a. Konsultan
   b. Advokat
   c. Perbengkelan
   d. Restoran
   e. Konstruksi
   f. Transportasi
   g. Telekomunikasi
   h. Pendidikan
   i. Simpan pinjam

2.1.5.2 Karakteristik UMKM

Karakteristik dasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berbeda dengan negara lain. Di negara lain UMKM dijadikan sebagai penghubung yang efektif dan terpercaya bagi perusahaan besar, namun UMKM di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda sehingga UMKM Indonesia masih kalah bersaing dengan UMKM di negara lain (Sujarweni, 2022). Karakteristik dasarnya adalah:

1. Sulitnya meminjam modal, terutama saat mengajukan kredit ke lembaga keuangan resmi. Sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia mewajibkan UMKM untuk menyusun laporan keuangan sebagai syarat pengajuan kredit.
2. Rendahnya kualitas SDM UMKM di Indonesia.
3. Kendala teknologi yang menyebabkan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan entitas.
4. Pembatasan perolehan bahan baku.
5. Lemahnya aspek pemasaran, sehingga entitas kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkannya.
6. Lemahnya hubungan kerjasama dengan perusahaan besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Mustika & Ferdila, (2022)	Analisa Kesiapan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan Penerapan SAK EMKM Pada Laporan Keuangan UMKM. (Studi Kasus Pada UMKM *Laundry* Box di Kota Batam)	UKM Laundry Box tidak menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangannya tetapi pencatatan masih berbasis *cash basis.* UMKM *Laundry* Box belum mengetahui SAK EMKM karena belum pernah menerima sosialisasi dari pihak manapun.
Sholihat & Hairudin (2021)	Analisis Implementasi Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK-EMKM) (Studi	Implementasi SAK EMKM Pada UMKM 7 Saudara belum terlaksana. UMKM 7 Saudara, masih belum mengetahui secara terperinci SAK EMKM itu seperti apa. Sitem Pencatatan yang masih menggunakan basis kas, sementara SAK EMKM menganut basis akrual. Serta SDM

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	kasus pada UMKM 7 Bersaudara)	yang masih kurang memadai dlama penerapan SAK EMKM pada UMKM 7 Saudara.
Uno *et al*. (2019)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi kasus pada rumah karawo diKota Gorontalo)	Rumah Karawo belum menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang berlaku dikarenakan minimnya pemahaman akan penyusunan laporan keuangan sesuai standar.
Rachmanti *et al*. (2019)	Analisis Penyusunan Laporan Keungan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM	UMKM Batik Jumput Dahlia, belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi Keuangan EMKM. Hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan yakni hanya mencatat keluar masuknya kas, serta tidak mencatat seluruh aset yang dimiliki.
Liasari & Wage, (2020)	Analisis Penerapan SAK-EMKM Pada Laporan Keungan UMKM Di Kota Batam	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akuntansi yang dilakukan oleh UMKM masih sebatas laporan bisnis (laporan yang tidak disusun sesuai standar akuntansi), yang dianggap oleh perusahaan sebagai laporan keuangan.
Nuvitasari *et al*. (2019)	Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	hasil penelitian yang dilakukan di UD.Karya Tangi Banyuwangi, terlihat bahwa laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh UD.Karya Tangi Banyuwangi masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM
Sholikin & Setiawan, (2018)	Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 UMKM yang terdapat di Kabupaten Blora dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK-EMKM karena kedua UMKM tersebut tidak mengetahui adanya SAK baru bagi UMKM.
Rosyidah *et al*. (2022)	Analisis Penerapan SAK-EMKM Pada Pelaku Usaha Kecil, Dan Pelaku Usaha Menengah	Menurut hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan untuk analisis penerapan SAK EMKM di toko Sularmi, pemiliknya menganggap toko tersebut hanya toko kecil dn tidak perlu melakukan pelaporan keuangan atau catatan akuntansi apapun.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Sandi *et al*. (2020)	Penerapan Standar Akuntansi Keungan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan A.D.D *Tour & Travel*	Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat sederhana. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa A.D.D *Tour & Travel* belum menerapkan SAK EMKM
Sularsih & Sobir, (2019)	Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	Hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan menunjukkan bahwa pelaku UMKM hanya menggunakan rekening dan memo sederhana dalam mencatat keuangan perusahaannya hal itulah yang menjadi alasan mengapa UMKM tidak menyusun laporan keuangan.
(Mutiah, 2019)	Penerapan Penyusunan laporan keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki masalah dalam menyusun laporan keuangan, yaitu terbatasnya pemikiran tentang mengelola laporan keuangan dan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan EMKM SAK, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan.